

Judul : Dinamika Pilkada, DPR tampung masukan publik
Tanggal : Selasa, 13 Januari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1 dan 15

DINAMIKA PILKADA

DPR Tampung Masukan Publik

JAKARTA, KOMPAS — Komisi II DPR menerima masukan terkait masyarakat yang cenderung menginginkan pemilihan kepala daerah atau pilkada secara langsung ketimbang pemilihan oleh DPRD. Semua masukan bakal dibahas dalam revisi Undang-Undang Pilkada, termasuk revisi Undang-Undang Pemilu yang menjadi Program Legislasi Nasional DPR 2026.

Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menyatakan terus mengamati dinamika terkait wacana pemilihan kepala daerah. Di satu sisi, sebagian besar partai politik di parlemen mendukung pilkada oleh DPRD. Sementara itu, publik cenderung tetap menginginkan pilkada langsung.

"Kami tidak menutup diri dengan dinamika yang ada, termasuk itu jajak pendapat, survei, dan seterusnya. Selama ini tentu kami pandang," ujar Rifqinizamy saat dihubungi dari Jakarta, Senin (12/1/2026).

Sebelumnya, jajak pendapat sember 2025 menunjukkan, 77,3 persen dari total 510 responden menginginkan pilkada langsung tetap digelar. Mereka berasal dari 76 kota di 38 provinsi yang dipilih secara acak, dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Adapun hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang dirilis pada Rabu (7/1) menunjukkan, 66,1 persen responden menyatakan kurang setuju atau tidak setuju sama sekali dengan gagasan pilkada oleh DPRD.

Sementara itu, dari parlemen dan partai politik, dorongan untuk pilkada oleh DPRD menguat pada 2025. Partai Kebangkitan Bangsa mengusulkan itu dalam pidato politik Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar pada Hari Ulang Tahun Ke-27 PKB.

Masih di tahun yang sama, Partai Golkar pun mendorong wacana itu dalam pidato Ketua Umum Bahil Lahadalia saat perayaan puncak HUT Ke-61 Partai Golkar. Kegiatan pada 5 Desember itu juga dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dan disambut positif olehnya.

Partai yang dipimpin Prabowo, Gerindra, kemudian mendukung gagasan tersebut. Partai Amanat Nasional (PAN) juga berkali-kali menyampaikan dukungannya.

Partisipasi bermakna

Jika dilihat dari dinamika ini, Rifqinizamy memandang perlu adanya partisipasi bermakna untuk menyikapi usulan-usulan tersebut. Oleh karena itu, Komisi II DPR membuka diri dan siap menjalankan tugas jika revisi UU Pilkada



Rifqinizamy Karsayuda

[Bersambung ke him 15 kol 1-2]

DPR Tampung Masukan

[Sambungan dari halaman 1]

dilakukan tahun ini.

Dalam Prolegnas 2026, Komisi II DPR telah memasukkan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 atau UU Pemilu. Selain itu, revisi UU tentang Perubahan Kedua atas UU No 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan.

"Secara literal, yang menjadi tugas Komisi II DPR hanyalah revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang isinya hanya dua jenis pemilu, yaitu pemilihan umum presiden-wakil presiden dan pemilihan umum legislatif," kata Rifqinzamy.

Adapun revisi UU No 10/2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Kata dia, belum dimasukkan menjadi bagian dari *short list* Prolegnas tahun 2026.

Setelah pembukaan masa sidang pada 13 Januari, Komisi II akan menggelar rapat internal komisi dan konsultasi kepada pimpinan DPR terkait fungsi legislasinya di tahun 2026. Terkait RUU Pemilu, pihaknya juga bakal mengundang sejumlah pihak yang berkepentingan dan peduli terhadap pemilu dan demokrasi.

Ia juga menekankan, kepastian untuk revisi UU Pemilu akan diakomodasi dalam bentuk kodifikasi atau tidak itu ada pada pimpinan fraksi dan DPR, termasuk di dalamnya penggabungan dengan sejumlah perundang-undangan terkait pemilihan, salah satunya RUU Pilkada.

"Kami siap menjalankan tugas jika revisi UU Pilkada menjadi bagian dari tugas legislasi dan diamanahkan kepada kami bersamaan dengan revisi UU

Pemilu. Kami ingin *meaningful participation* dengan membuka diri kepada semua *stakeholder*, termasuk masyarakat," ujar Rifqinzamy.

Mengkaji serius

Dorongan untuk menolak usulan pilkada oleh DPRD juga disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi UU Pemilu. Dalam surat pernyataan yang disepakati 18 organisasi sipil pada Minggu (11/1), koalisi meminta partai politik dan penyelenggara negara untuk mengkaji serius terkait upaya meningkatkan kualitas pemilihan langsung ketimbang menggantinya menjadi tidak langsung.

Koalisi ini juga mengajak seluruh elemen publik untuk menjaga dan mempertahankan pilkada langsung sebagai instrumen kontrol rakyat terhadap kekuasaan di tingkat lokal. Selain itu, menolak segala bentuk kemunduran demokrasi yang mengurangi partisipasi dan hak politik warga negara.

Penasihat Senior Lab 45, Haryadi, saat dihubungi dari Jakarta, Minggu, menyebut, sikap elite sejumlah partai politik untuk mengubah sistem pilkada langsung menjadi tak langsung tampak sebagai imitasi partai politik kartel.

Peneliti Themis Indonesia, Fadli Ramadhanil, mengatakan, alasan ongkos politik tinggi apabila pilkada dilakukan secara langsung tidak terlalu relevan. Sebab, jika dicermati, ongkos politik yang dikeluarkan kandidat lebih banyak untuk membayar mahar politik ke partai politik dan politik uang. Kedua tindakan tersebut merupakan perilaku yang diharamkan dalam pilkada. (RTG/INA/ANA)